Roadmap Menuju Fisipol Unggul

Roadmap Menuju Fisipol Unggul

Sejarah Pendirian Fisipol
Chontina Siahaan

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Tantangan Menuju Akreditasi Internasional
V.L. Sinta Herindrasti

Peran Alumni Membawa UKI Menjadi Universitas Unggulan
Dandy Sendayu Noron
Eka C. Herlambang

Idealisme Mahasiswa Berprestasi Dalam Menggaungkan Nama Fisipol UKI yang Unggul
Nadya Carollina
Shyintia

Pendidikan Politik Berdasarkan Pancasila dalam Menghasilkan Zoon Politicon Indonesia yang Berkarakter
Fransiskus X. Gian Tue Mali

Gambaran Terkini, Isu-isu Strategis dan Upaya Pencapaiannya
Angel Damayanti

Harapan untuk 25 Tahun Program Studi Hubungan Internasional
Mita Yesyca

Jurnal Sociae Polites: Masa Kini dan Mendatang
V.L. Sinta Herindrasti

25 Tahun Fisipol UKI (1994-2019)

ROADMAP
MENUJU FISIPOL UNGGUL

Penulis:
Angel Damayanti – Chontina Siahaan
Dandy Sendary Noron – Eka C Herlambang
Fransiskus X Gian Tue Mali – Mita Yesyca
Nadya Carollina – Shyintia - VL Sinta Herindrasti

Daftar Isi

Daftar Singkatan 06

Kata Sambutan Rektor UKI 08

Pengantar Redaksi 10

Sejarah Pendirian Fisipol 15
Chontina Siahaan

Pendidikan Politik Berdasarkan Pancasila dalam Menghasilkan Zoon Politicon Indonesia yang Berkarakter 21
Fransiskus X. Gian Tue Mali

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Tantangan Menuju Akreditasi Internasional 34
V.L. Sinta Herindrasti

Gambaran Terkini, Isu-isu Strategis dan Upaya Pencapaiannya 58
Angel Damayanti

Peran Alumni Membawa UKI Menjadi Universitas Unggulan 69
Dandy Sendayu Noron
Eka C. Herlambang

Harapan untuk 25 Tahun Program Studi Hubungan Internasional 77
Mita Yesyca

Idealisme Mahasiswa Berprestasi Dalam Menggaungkan Nama Fisipol UKI yang Unggul 84
Nadya Carollina
Shyintia

Jurnal Sociae Polites: Masa Kini dan Mendatang 90
V.L. Sinta Herindrasti, MA

Para Penulis 98

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA DAN TANTANGAN MENUJU AKREDITASI INTERNASIONAL

V.L. SINTA HERINDRASTI

Ketua Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo no.2, Cawang - Jakarta, 13630, Indonesia

Herindrasti@yahoo.com, valentina.herindrasti@uki.ac.id

Pengantar

Memandang dunia pendidikan di Indonesia bak melihat berbagai potret realitas yang sangat beragam dimana masing-masing bermuara pada masalah-masalah yang sangat mendasar yang tidak mudah diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Harapan terhadap pendidikan sebagai jalan bagi peningkatan kesejahteraan sangatlah tinggi sehingga harapan akan kualitas mutu pendidikan pun juga menjadi semakin tinggi. Bagi negara seluas dan sepadat Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 269 juta terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok (1,4 milyar), India (1,3 milyar), dan Amerika Serikat (328 juta) (Jayani 2019), masalah pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Menimbang banyaknya para pihak (stakeholders) yang terkait dengan dunia pendidikan maka dapat dibayangkan bagaimana kompleksnya suatu usaha pengaturan penjaminan dan peningkatan mutu perguruan/pendidikan tinggi (PT) ketika harus menjawab seluruh kebutuhan para pemangku kepentingan.

Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohmmad Nasir dalam salah satu pidatonya, menyatakan bahwa perguruan tinggi harus bisa menjawab persoalan sosial yang semakin kompleks baik dari segi jenis maupun substansinya (Putri 2018). Diyakini semakin banyak sumber daya yang dihasilkan oleh PT akan semakin banyak alternatif solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Harapan tersebut mengandaikan bahwa kualitas mutu PT tinggi, kualitas lulusan tinggi memiliki relevansi

kualifikasi lulusan PT dengan kebutuhan dunia kerja dan karakter kebiasaan lulusan yang baik. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian.

Merujuk data BAN-PT 2017, dari 4530 PT di Indonesia (lebih besar dari Tiongkok yang hanya 1500-an) mayoritas (65%) masih terakreditasi C, sisanya 31% terakreditasi B dan 4% terakreditasi A. Malahan menurut APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) masih ada sekitar 56% PT dan 23% prodi yang belum terakreditasi. Berdasarkan data BAN-PT dari total 4600 PT di Indonesia, hingga kini baru 1975 yang telah terakreditasi. Di lain pihak, Kemristekdikti bahkan menargetkan pada tahun 2018 tiap perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) memiliki akreditasi internasional minimal lima (5) program studi per-universitas.

Tulisan ini hendak melihat relevansi akreditasi dalam peningkatan kualitas lulusan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, kebutuhan akan akreditasi internasional setelah pencapaian akreditasi nasional serta tantangan yang harus dihadapi dalam proses peningkatan akreditasi internasional.

Relevansi Pelaksanaan Akreditasi Nasional dan Internasional

Mengapa akreditasi menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan Indonesia dewasa ini? Apa manfaat akreditasi bagi lembaga PT dan pihak lain terutama pihak pengguna?

Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input, proses, output, outcomes, dan sistem/manajemen mutu pendidikan di suatu program studi/perguruan tinggi. Pengakuan atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional, mau pun internasional. Mutu dalam pendidikan tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan. Mengingat beragamnya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, mutu pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai konsep multi dimensi (Kemristekdikti 2019, hal. 3).

Mengingat besarnya kuantitas perguruan tinggi maka pelaksanaan akreditasi menjadi hal yang mutlak. Bagaimana mutu dapat dipantau jika instrumen akreditasi tidak diberlakukan secara ketat dan menjangkau seluruh lembaga yang ada baik di kota maupun pelosok?

Menurut forlap Ristekdikti (Kemristekdikti 2019), jumlah total perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4645 buah, terdiri dari Akademi 993, Politeknik 298, Sekolah Tinggi 2510, Institut 223, Universitas 621. Sementara itu jumlah total program studi dari sumber yang sama mencapai 28.106 buah, terdiri dari program studi Agama 1620, Humaniora 702, Sosial 4098, MIPA 1159, Seni 403, Kesehatan 3827, Teknik 5177,

Pertanian 1912, Ekonomi 3387 dan Pendidikan 5821. Data ini menyangkut semua kategori perguruan tinggi (negeri dan swasta), semua jenjang (Di, D2, D3, D4, Non formal, informal, lainnya, Sp-1, Sp-2, Profesi, S1 Terapan, S2 Terapan), semua wilayah koordinasi dan semua provinsi.

Gambar 2.1 Grafik Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia

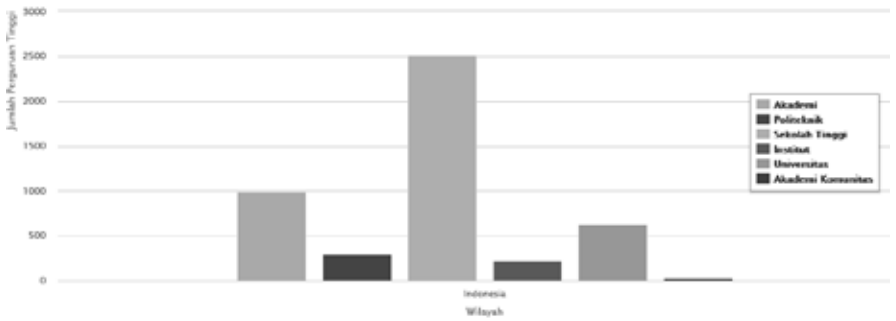

Sumber: Ristekdikti, 2019

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Program Studi di Indonesia

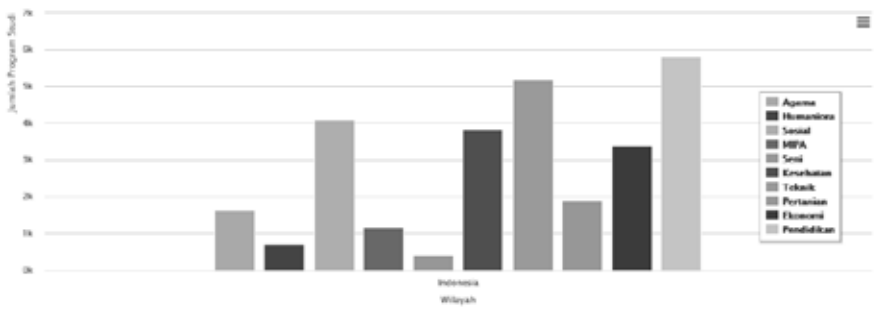

Sumber: Ristekdikti, 2019

Sementara itu, terdapat 80 universitas yang mempunyai program studi Hubungan Internasional di seluruh Indonesia. Prodi HI ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Saat ini prodi HI tersebar di Universitas Airlangga-Unair Surabaya, Universitas Gadjah Mada-UGM Yogyakarta, Universitas Indonesia-UI Jakarta, Universitas Jember-Unej, Universitas Padjadjaran-Unpad, Bandung, Universitas Riau-Unri Pekanbaru, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IISIP Jakarta, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, UKP Bandung, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta, Universitas Paramadina Jakarta, STIKOM London School of Public Relation (LSPR) Jakarta Selatan, Universitas Al Azhar Jakarta, Budi Luhur Jakarta Selatan, Universitas Pertamina, Bina Nusantara Jakarta Barat, Universitas Nasional Jakarta Selatan, UPN Jakarta, Universitas Setya Negara Indonesia Jakarta Selatan, Universitas Bakrie Jakarta Selatan, Universitas Jayabaya, Universitas 17 Agustus Jakarta Utara, Universitas Muslim Bireun, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Universitas Megow Pak Tulang Bawang, Universitas Lampung Bandar Lampung, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Islam Riau, Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Universitas Riau, Universitas Tanjung Pura, Universitas Nahdlotul Ulama Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Mulawarwan,Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Universitas Fajar, Makasar, Universitas Bosowa Makasar, Universitas Hasanuddin, UniversitasDarul Ulum Jombang, Universitas Udayana, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas Ma Chung Malang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Universitas Presiden Cikarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Peradaban Brebes, Universitas Majalengka, Universitas Al Ghifari Bandung, Universitas Komputer Indonesia (Initu. id 2018). Faktor besarnya kuantitas ini yang menjadikan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) mempunyai tugas sangat besar untuk menjalankan dan menuntaskan PT yang belum terakreditasi.

Faktor lain yang menjadikan akreditasi BAN-PT suatu kebutuhan adalah akreditasi sebenarnya merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi memiliki tujuan ganda, yaitu: (i) Menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat, (ii) Mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Proses ini merupakan proses penilaian dengan berbagai kriteria (baik bagi PT maupun program studi) yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan pengakuan pemerintah kepada PT akan hasil akreditasinya.

Dari segi manfaat, akreditasi juga berguna dalam rangka pengusulan proyek lembaga dimana PT dengan akreditasi A dapat mengusulkan

proyek dengan nilai sekian miliar yang besarannya tentu berbeda dengan PT/program studi akreditasi B atau C. Sedangkan manfaat akreditasi bagi lulusan adalah menjadi syarat ketika akan bekerja terutama untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Banyak lembaga menetapkan syarat nilai akreditasi tertentu PT atau prodi bagi lulusannya ketika melamar kerja. Intinya akreditasi adalah pengakuan akan kualitas proses pendidikan yang menghasilkan luaran lulusan yang dijamin kualifikasi dan kualitasnya setelah menjalani proses yang diakui nilainya dengan berbagai kriteria.

Apabila akreditasi nasional dengan kualifikasi tertinggi sudah diperoleh, maka pemerintah juga mendorong untuk melakukan persiapan akreditasi internasional yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan (rekognisi) pada tingkat yang lebih luas baik regional maupun internasional. Percepatan akreditasi internasional oleh pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti didorong oleh masih rendahnya program studi yang mendapatkan rekognisi internasional. Data Kemenristekdikti bulan Juni 2019 menunjukkan bahwa dari 27.779 program studi aktif yang ada di Indonesia, baru 395 program studi yang telah meraih rekognisi internasional melalui perolehan akreditasi/sertifikasi internasional. Perguruan tinggi di Indonesia yang program studinya telah terekognisi internasional ditunjukkan pada Tabel 1. Perolehan 5 (lima) tertinggi didapat oleh Universitas Gadjah Mada, disusul oleh Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor. Jumlah program studi yang telah memperoleh rekognisi internasional tersebut jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah program studi yang terakreditasi A oleh BAN PT. Total program studi yang terakreditasi A dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.762 program studi (per Juni 2019). Jadi total program studi terakreditasi A sekaligus terrekognisi internasional adalah 10,5% dari total program studi aktif (Kemristekdikti, Buku Pedoman Program Fasilitas Program Studi menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional 2019). Kemenristekdikti juga menggambarkan sebaran rekognisi internasional

Tabel 1.1 Jumlah Program Studi Rekognisi Internasional berdasarkan Perguruan Tinggi Di Indonesia

PERGURUAN TINGGI	JUMLAH PROGRAM STUDI
Universitas Gadjah Mada	65 Prodi
Universitas Airlangga	40 Prodi
Institut Teknologi Bandung	39 Prodi
Universitas Indonesia	38 Prodi
Institut Pertanian Bogor	28 Prodi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	20 Prodi
Universitas Brawijaya	19 Prodi
Universitas Islam Indonesia	19 Prodi
Universitas Hasanudin	14 Prodi
Universitas Islam Bandung	14 Prodi
Universitas Pendidikan Indonesia	12 Prodi
Universitas Telkom	12 Prodi
Universitas Diponegoro	10 Prodi
Politeknik Negeri Bandung	10 Prodi
Universitas Andalas	7 Prodi
Universitas Bina Nusantara	6 Prodi
Universitas Kristen Duta Wacana	6 Prodi
Universitas Negeri Padang	6 Prodi
Universitas Sebelas Maret	5 Prodi
Universitas Trisakti	5 Prodi
Universitas Padjadjaran	3 Prodi
Universitas Surabaya	3 Prodi
Universitas Muhamadiyah Malang	3 Prodi
Universitas Sumatera Utara	2 Prodi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2 Prodi
Universitas Islam Sultan Agung	2 Prodi
Universitas Lampung	1 Prodi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1 Prodi
Universitas Parahyangan	1 Prodi
Universitas Tarumanegara	1 Prodi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	1 Prodi
Total	395 Prodi

Sumber: Ristekdikti, 2019

sesuai bidang (Gambar 1) dimana rumpun Teknik menduduki posisi tertinggi disusul oleh rumpun Ekonomi dan Kesehatan.

Gambar 2.3 Sebaran Rekognisi Internasional berdasarkan Rumpun Keilmuan

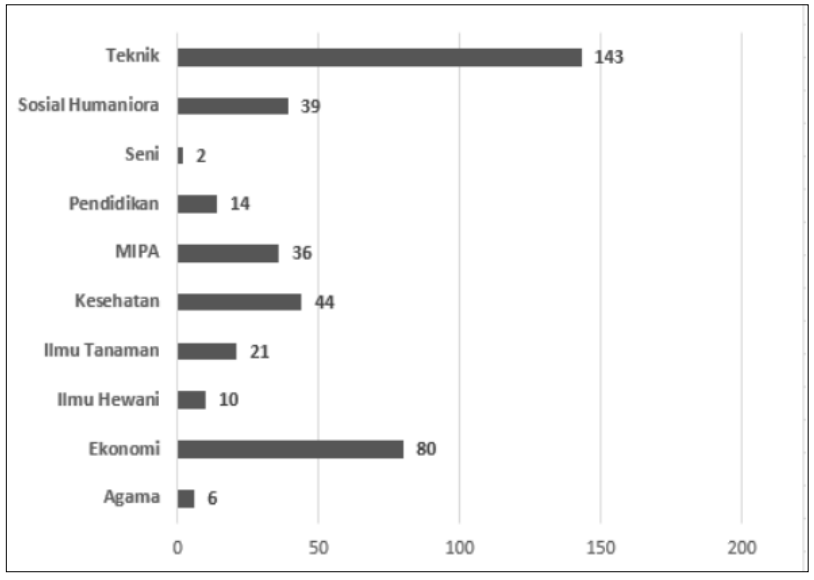

Sumber: Kemenristekdikti, 2019

Peta Jalan Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah membentuk Tim Penyusunan Roadmap Akreditasi Internasional, di bawah koordinasi Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebagai bagian dari program fasilitasi program studi menuju rekognisi internasional. Adapun fokus adalah pada program akreditasi dan sertifikasi AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) -- suatu kelompok Chief Quality Officers (CQOs) yang ditunjuk oleh universitas anggota AUN sebagai focal point untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rangka realisasi misi harmonisasi standar pendidikan dan perbaikan kualitas akademik secara terus menerus universitas-universitas di ASEAN.
Tujuan dari akreditasi/sertifikasi internasional adalah: (1) sebagai panduan dan pedoman umum untuk pembinaan PT agar diakui internasional; (2) memberi gambaran umum tentang persyaratan dan proses untuk mencapai pengakuan internasional; (3) sebagai panduan untuk strategi dan pengembangan penjaminan mutu terkait akreditasi/sertifikasi internasional, dan (4) sebagai pedoman awal untuk mencapai pengakuan internasional. Berbagai kata kunci penting juga disertakan agar terjadi penyamaan persepsi di kalangan pemangku kepentingan, misalnya pengertian Akreditasi - suatu

pengakuan terhadap lembaga pendidikan (bukan lulusan) yang diberikan oleh badan yang berwenang sebagai hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat/kriteria mutu yang ditetapkan. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan dan bukan kepada lulusan. Pengertian Sertifikasi – yaitu pemenuhan kriteria kelulusan dan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang sesuai dengan kriteria/standar yang ditetapkan oleh suatu badan internasional. Pengertian Validasi – adalah proses pembuktian menggunakan metode yang tepat untuk memastikan tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang dilakukan pada lembaga sehingga hasil dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang direncanakan. Pengertian Asesmen – adalah proses pengumpulan dan analisis data/informasi secara sistematik sebagai dasar perencanaan, dan pengembangan mutu lembaga secara berkelanjutan. Pengertian Surveilan – adalah indikasi pengawasan berkala berupa pengumpulan dan analisis data/informasi secara terus menerus/periodik dan sistematik untuk memastikan standar/kriteria dipenuhi secara berkelanjutan atau bagian dari proses re-akreditasi.

Dalam proses rekognisi internasional, evaluasi dilakukan oleh asesor independen yang berasal dari berbagai negara. Evaluasi dianggap sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat memperoleh pengakuan internasional. Evaluasi umumnya menggunakan outcomes-based education (OBE) sebagai kriteria rujukan utama dimana fokusnya adalah kemampuan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa pada akhir proses pembelajaran. Sebagai suatu sistem pendidikan OBE melakukan banyak hal termasuk melakukan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan monitoring/evaluasi dalam proses pendidikan. Struktur kurikulum dirancang agar kemampuan mahasiswa yang telah didefinisikan dapat tercapai dan mahasiswa bisa menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. OBE menekankan pada apa yang siswa dapat dan mampu lakukan, bagaimana lembaga dapat membantu mahasiswa mencapai kemampuan tersebut dan bagaimana kita tahu bahwa mahasiswa telah mencapai kemampuan tersebut dan apakah diperlukan perbaikan kualitas terus menerus (continuous quality improvement). Dengan demikian setiap tahapan dalam pembuatan kurikulum dan pencapaiannya menjadi sangat penting.

Dalam program fasilitasi program studi menuju rekognisi internasional, Kemenristekdikti juga mempertimbangkan kesiapan program studi melalui pengelompokkan berdasarkan kesiapan. Kriteria yang digunakan dalam pengelompokan program studi adalah (i) kriteria lembaga Akreditasi Internasional – suatu lembaga akreditasi internasional dipilih

dengan melihat kriteria substansi, kelembagaan, reputasi dan kematangan; (ii) Kriteria komitmen; (iii) Kriteria Administratif (dasar) - kriteria akreditasi dan budaya mutu berkelanjutan; (iv) Kriteria susbtansi lanjut meliputi kriteria evaluasi diri berbasis standar rekognisi internasional dan pemenuhan standar internasionalisasi (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Juni 2019, hal 5). Tabel 2 menunjukkan pengelompokkan program studi berdasarkan kriteria kesiapan tersebut di atas untuk dapat membantu setiap program studi memposisikan dirinya Dengan tersedianya kriteria yang dapat menunjukkan

Tabel 1.2 Pengelompokkan Program Studi berdasarkan Kriteria Kesiapan Menuju Rekognisi Internasional

KELOMPOK	CAPAIAN	INDIKATOR
Kelompok 1	Program Studi telah rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi rekognisi internasional; 2. Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif maupun substantif.
Kelompok 2	Program Studi dalam proses rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi rekognisi internasional; 2. Program studi telah memenuhi semua kriteria dasar namun belum memenuhi semua kriteria substantif.
Kelompok 3	Program Studi Menuju rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai komitmen tetapi belum mampu menyusun strategi yang sistematis untuk mendorong program studi rekognisi internasional; 2. Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif namun belum memenuhi semua kriteria subtantif.
Kelompok 4	Program Studi berpotensi menuju rekognisi internasional	1. Institusi telah mempunyai komitmen tetapi belum mampu menyusun strategi secara sistematis; 2. Program studi telah memenuhi sebagian besar kriteria administratif maupun substantif.

Sumber: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Juni 2019, hal 6

kesiapan program studi dalam rangka usaha rekognisi internasional, maka program studi di Indonesia dapat terbantu untuk mempersiapkan diri dengan kriteria-kriteria yang diminta oleh asesor internasional.

Untuk mempercepat program studi memperoleh regoknisi internasional, Ditjen Belmawa menerapkan empat program strategi, yaitu:

1. Program Fasilitasi Program Studi – untuk memastikan program studi yang telah memulai proses rekognisi internasional berhasil dalam proses tersebut;
2. Program Akselerasi Program Studi - untuk mendorong program studi yang potensial maupun sedang dalam persiapan agar terakselerasi untuk mendapatkan rekognisi internasional;
3. Program Pendampingan Program Studi - untuk memberi bantuan teknis dan penguatan institusional baik kepada program studi maupun institusi untuk dapat menyusun strategi internal menuju rekognisi internasional;
4. Program Pemeliharaan dan Pengasuhan Program Studi - untuk memastikan program studi yang telah rekognisi internasional dapat mempertahankan statusnya dan turut mendiseminasikan pengalamannya ke program studi/ institusi lain melalui program asuh serta berkontribusi dalam memperkuat kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia di mata internasional.

Program fasilitasi atau layanan program studi untuk mendapatkan rekognisi internasional Kemenristekdikti dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Deskripsi program

Program layanan peningkatan mutu program studi agar terekognisi internasional melalui bimbingan teknis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan OBE, mengembangkan sistem dan manajemen mutu di program studi agar memenuhi syarat rekognisi internasional.

2. Tujuan

a.Memfasilitasi 10 (sepuluh) program studi/fakultas untuk persiapan meraih rekognisi internasional dalam upaya meningkatkan jumlah program studi yang terekognisi internasional;

b. Memastikan program studi mendapat rekognisi internasional.

3. Sasaran

a.Program studi dalam klaster 2, yaitu program studi dalam proses rekognisi internasional;

b.Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi terrekognisi internasional.

c.Program studi telah memenuhi semua kriteria dasar namun belum memenuhi semua kriteria substantif.
d.Rencana rekognisi telah diterima oleh lembaga akreditasi/AUN-QA.

4. Output program

a.Tersusunnya strategi dan peta jalan program studi menuju rekognisi internasional.
b.Ada upaya progres pelaksanaan OBE, sebagai prasyarat rekognisi internasional.
c.Dokumen kelayakan untuk mengajukan proses rekognisi internasional.

5. Indikator keberhasilan

Program studi terekognisi internasional dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada tahun 2020.

6. Dasar Hukum

1. 1.Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. 2.Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. 3.Permenristekdikti No. 15 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;
4. 4.Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 juncto No 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. 5.Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi;
6. 6.Permenristekdikti No.62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. 7.Permenristekdikti No. 50 tahun 2017, tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;

Kemenristekdikti melalui program fasilitasi juga akan melakukan kegiatan bimbingan teknis selama 3 kali, yaitu:

1.Bimbingan Teknis I: Asesmen outcomes.

Pada bimbingan teknis ini peserta akan dibimbing untuk mereview rumusan outcomes program studi dan merumuskan tahapan-tahapan untuk asemen outcomes tersebut. Peserta akan dibimbing untuk merencanakan asesmen dan melakukan asesmen outcomes untuk beberapa outcomes program studi dengan menggunakan metode yang sesuai. Ouput dari bimbingan teknis ini adalah, peserta dapat melakukan asesmen untuk seluruh outcomes. Hasil asesmen ini selanjutnya perlu dianalisis dan dievaluasi sehingga program studi mengetahui tingkat ketercapaian/pemenuhan outcomesnya. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui gap yang terjadi sehingga rencana perbaikannya dapat ditentukan.

2. Bimbingan Teknis II: Penyusunan Dokumen Rekognisi.

Peserta perlu menetapkan terlebih dahulu rencana badan rekognisi internasional yang akan dituju. Selanjutnya pada bimbingan teknis kedua ini, peserta akan dibimbing untuk memahami kriteria-kriteria dalam akreditasi sehingga peserta dapat menyusun self assessment report (SAR) dengan baik. Bimbingan teknis akan dilakukan secara paralel sesuai dengan jenis rekognisi yang akan dituju.

3. Bimbingan Teknis III: Persiapan Visitasi

Setiap proses rekognisi selalu diikuti dengan proses asesmen lapangan. Pada bimbingan teknis ini akan dijelaskan elemen-elemen yang penting untuk dipersiapkan agar proses rekognisi internasional dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu peta jalan pengembangan program studi menuju akreditasi/sertifikasi internasional akan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Proses Rekognisi/Pengakuan Internasional

- Tahap persiapan menuju akreditasi/sertifikasi internasional
- Tahap proses akreditasi/sertifikasi
- Tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan)

2. Tahap Persiapan Menuju Akreditasi/Sertifikasi

- Adopsi Outcome-based Education (OBE)
- Memodifikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sesuai dengan paradigma OBE
- Melakukan kondisi awal program studi
- Melakukan asesmen kecukupan (readiness)

3. Tahap Proses Akreditasi/Sertifikasi

- Pendaftaran formal ke board of accreditation/certification
- Pengajuan dokumen akreditasi
- Visitasi atau asesmen lapangan
- Penentuan hasil akreditasi/sertifikasi

4. Tahap Pasca Akreditasi/Sertifikasi (Pemeliharaan)

- Melakukan pelaporan kinerja tahunan (annual report)
- Melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan

- Ikut serta menyebarluaskan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi lain yang sebidang.

Badan/lembaga Akreditasi Internasional

Dalam melakukan pemilihan badan akreditasi internasional, perlu berbagai pertimbangan dan kriteria agar pemilihan tersebut tepat sasaran. Panduan dari Kemenristekdikti antara lain adalah (i) Badan akreditasi telah menunjukkan pengukuran yang berbasis outcome based education/ evaluation, (ii) Badan akreditasi telah menunjukkan perhatian yang besar pada aspek scholarship (kewibawaan dan nilai kesarjanaan), (iii) Badan akreditasi telah mengembangkan standar, syarat dan prosedur terhadap proses pendidikan dan pembelajaran secara komprehensif, (iv) Badan akreditasi telah menunjukkan rekam jejak keterterimaan yang luas oleh badan akreditasi lain (inter-recognition), (v) Badan akreditasi menunjukkan good governance yang ditunjukkan dengan struktur organisasi yang independen dan menghindarkan conflict of interest, (vi) Badan akreditasi telah menunjukkan kehadiran (presence) dan keterterimaan dalam lingkup global atau minimal regional, (vii) Badan akreditasi telah menunjukkan usia yang matang.

Beberapa badan/lembaga akreditasi Internasional yang telah menjadi rujukan adalah:

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
- ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering/ Computer Science, the Natural Science and Mathematics)
- JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education)
- KAAB (Korean Architecture Accrediting Board)
- RSC (Royal Society of Chemistry)
- AACSB (Association to Advance Collegiate of Schools of Business)
- EQUIS/EPAS (European Foundation for Management Development)
- ABEST21 (The Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow)
- IFT (Institute Food Technology)
- SWST (Society of Wood Science and Technology)
- WFME (The World Federation for Medical Education)
- RTPI (The Royal Town Planning Institute)
- UNWTO-Tedqual (United Nations World Tourism Organization Tedqual)
- IMAREST (Institute of Marine Engineering, Science and Technology)
- AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences)
- APACPH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health)
- AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance)

Badan Akreditasi Internasional AUN-QA

Jaringan AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) sebenarnya merupakan suatu kelompok Chief Quality Officers (CQAs) yang ditunjuk oleh unversitas anggota AUN sebagai focal point untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam rangka merealisasi tujuan harmonisasi standar pendidikan dan mengusahakan perbaikan berkelanjutan kualitas akademik universitas-universitas di ASEAN. Kegiatan AUN-QA dilaksanakan oleh QOAs sesuai dengan Persetujuan Bangkok (Bangkok Accord) 2000 (Chula 2018), yang menerbitkan seperangkat pedoman untuk mendukung pengembangan sistem penjaminan mutu sebagai instrumen mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan pengajaran, penelitian dan keseluruhan standar-standar akademik universitas anggota AUN. Sejak kesepakatan Bangkok (2000) AUN-QA secara aktif meningkatkan, mengembangkan dan melaksanakan praktek-praktek penjaminan mutu berdasarkan pendekatan empiris dimana praktek penjaminan mutu telah dibagikan, diuji coba, dievaluasi dan diperbaiki. Jika kita mengamati perjalanan AUN-QA atau AUN-QA timeline (AUN-QA 2016), nampak bahwa lembaga AUN-QA sejak memulai kegiatan pada tahun 1998 hingga 2018 telah melakukan berbagai pertemuan, upaya peningkatan penjaminan mutu bahkan melakukan akreditasi terhadap berbagai universitas di negara anggota ASEAN. Pengembangan dari tahun ke tahun dapat dijadikan bukti dan petunjuk bahwa AUN-QA merupakan lembaga akreditasi internasional yang sudah teruji (credible) dan menjadi lembaga akreditasi yang semakin diakui untuk rekognisi internasional universitas di ASEAN. Kegiatan pengembangan asesmen dan akreditasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Kegiatan AUN-QA 1998-2018

TAHUN	PERTEMUAN	PELATIHAN	ASESMEN
1998	AUN-QA inititated by 4th AUN BOT Meeting		
2000	AUN-QA inititated by 4th AUN BOT Meeting		
	Chief Quality Officers (CQOs)		
2004	AUN-QA Guidelines		
2005	Draft AUN-QA Manual		
2006	AUN-QA Manual		
2007	AQA Program Assessment		The 1st UM, Malaysia
2008	AQA Programme Assessment		2nd DLSU, Phillipines, 3rd UI, Indonesia, 4th ITB, Indonesia
	AUN-QA Guideline, Chinese Edition		
		The 1st Training of New AUN-QA Assessors	
2009	AUN-QA Guideline Vietnamese Edition was approved by BOT		
		IAI-QA Training Manual	
	AQA Programme Assessment		5th UGM, Indonesia, 6th VNU-HN, Viet Nam, 7th VNU-HCM Viet Nam
		2nd Training of New AUN-QA Assessors	
2010	AQA Programme Assessment		8th UI Indonesia, 9th DLSU Philippines, 10th VNU HN, Viet Nam
		IAI QA Trainings	NUOL, Laos; RUPP Cambodia, VNU-HCM, Viet Nam
2011	NUOL, Laos; RUPP Cambodia, VNU-HCM, Viet Nam		
	AQA Programme Assessment		11th UGM Indonesia, 12th DLSU Philippines, 13th VNU-HCM Vietnam, 14th UP Philippines
		AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment	
		DAAD ASEAN QA Training Workshop on QA part 1t	
2012	AUN-QA Workshop and CQOs Meeting		
		DAAD ASEAN QA Training Workshop on QA part 2	
		AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment	
	AQA Programme Assessment		14th VNU HN Vietnam, 15th UI Indonesia, 15th UI Indonesia, 16th VNU-HN Viet Nam
		AUN-QA Training Course, Bangkok	
	AUN ADB Project for CLM Countries		
		DAAD ASEAN-QA Training Workshop on QA	
	AQA Programme Assessment		17th IPB Indonesia, 18th VNU-HN Viet Nam, 19th VNU-HCM Viet Nam, 20th UGM Indonesia, 21th UNAIR Indonesia, 22ns DLSU Philippines, 23rd UI Indonesia, 24th VNU-HN Viet Nam
2013		AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment	
		AUN –QA Advance Training Course	
2014	AQA Programme Assessment		25th UP Philippines, 26th CU Thailand, 27th IPB Indonesia, 28 TH-VNU Viet Nam, 29th UGM Indonesia, 30th VCU-HCM Viet Nam, 31st CTU Viet Nam, 32nd UGM Indonesia, 33rd DLSU Phillipines, 34th VNU-HCM Viet Nam, 35th UI Indonesia.
		AUN-QA Training 1	
		AUN-QA Training 2	
	AUN-ADB Project for CLM Countries		

2015	AQA Programme Assessment		37th IPB Indonesia, 38th UNDIP Indonesia, 39th ITS Indonesia, 40th UNAIR Indonesia, 41th UUM Malaysia, 42rd UGM Indonesia, 43th UUM Malaysia, 44th UNAIR Indonesia, 45 UB Indonesia, 46th CU Thailand.
		AUN-QA Training 1	
		AUN-QA Training 2	
		ADB Training	
		DAAD ASEAN-QA Training Workshop on IQA	
	AUN-QA CQO's Meeting		
2016-2018	Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level		
	EU SHARE Project		

Sumber: AUN-QA, 2016

Dalam perjalanannya selama hampir 20 tahun, AUN-QA tidak lepas dari jatuh bangun untuk menjadi lembaga akreditasi unggul di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya AUN-QA tidak hanya dibangun dari ASEAN, tetapi juga didukung oleh jaringan ASEAN (ASEAN Plus 3). Seperti dinyatakan oleh AUN-QA Chair Person:

> *"From the establishment of AUN- QA in 1998, the AUN-QA Network has grown leaps and bounds. Consistently re-defining itself to be the leading Quality Assurance in the region, aiming at increasing quality of higher education within the ASEAN region. Our achievements can be reflected in the continual trust and confidence in the AUN-QA network from our AUN Member Universities and our growing number of AUN-QA Associate Members. Sixteen years of experiences culminated from series of AUN-QA Assessments, AUN-QA trainings, and expanding cooperation with regional and international partners has proven how far we have come and the strength of our foundation as the AUN-QA network.*
>
> *AUN-QA is also officially recognized by not only Senior Officials Meeting on EducaASEAtion (ASED), but also extended to the ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED+3) and ASEAN Plus Three Education Ministers meeting (ASED+3). These recognition could not come afar without the support among the AUN-QA Members and the trust that we have received from our university networking. With the growing strength, trust and experience, the AUN-QA Network is ready to take to the next step, the new frontier of the AUN-QA on the development of the AUN-QA Assessment at institutional level.*
>
> *It is our responsibility to promote quality assurance in higher education institutions, raise the quality of higher education and collaborate with both regional and international bodies for the benefit of the ASEAN community is a great duty which must be efficiently executed by an experienced body. With the 16 years of achievements within our AUN-QA System and Mechanisms, we will remain steadfast to our principles, and continue to promote the Quality Assurance Development in the region and beyond, with a touch of quality". (AUN-QA 2016)*

AUN-QA membangun jaringan dan mendapatkan manfaat dari lembaga-lembaga jaringannya antara lain dengan Universitas Postdam, SEAMO RIHED *(the South-East Asian Ministers of Education Organization Centre specializing in higher education development-Thailand)*, DAAD - *Deutscher Akademisher Austauschdienst/German Academic Exchange Programme,* SHARE - *a programme by EU and ASEAN to strengthen regional co-operation and enhance the quality, regional competitiveness and internationalisation of ASEAN higher education institutions and students)*, ADB – *Asian Development Bank,* AQAN – *ASEAN Quality Assurance Network*, ENQA-EU – *European Association for Quality Assurance in Higher Education* dan DIES. Keanggotaan AUN-QA tidak terbatas pada universitas negara anggota ASEAN (A membership) namun juga terbuka untuk universitas-universitas non AUN asal memenuhi persyaratan keanggotaan AUN (B membership). Penampilan profil sekilas AUN-QA yang digagas oleh ASEAN telah menunjukkan kredibilitas AUN-QA sebagai lembaga akreditasi regional yang terpercaya dimana universitas-universitas negeri maupun swasta di Indonesia patut melaksanakan akreditasi oleh AUN-QA.

Pengalaman Akreditasi Internasional Universitas di Indonesia: Universitas Indonesia

Sekilas kita ingin mendapatkan gambaran pengalaman akreditasi internasional universitas di Indonesia. Tentu selain adanya kebijakan dari pimpinan dengan sinergi pemerintah, pada umumnya universitas negeri utama mempunyai kapasitas dan modalitas untuk melaksanakan akreditasi internasional.

Akreditasi internasional bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi juga merupakan upaya dan komitmen program studi (Prodi) di Universitas Indonesia dalam meningkatkan standar penjaminan mutu akademik serta mendapatkan pengakuan sebagai prodi bertaraf internasional oleh masyarakat di seluruh dunia. Berikut ini beberapa program studi di Universitas Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu:

- Program Studi S1 Fisika FMIPA UI, meraih predikat *'Better than Adequate'* pada asesmen tingkat prodi AUN-QA *(ASEAN University Network Quality Assurance)*;
- Program Studi S1 Biologi FMIPA UI, meraih predikat *'Better than Adequate'* pada asesmen tingkat prodi AUN-QA *(ASEAN University Network Quality Assurance);*
- Program Studi S1 Matematika FMIPA-UI, meraih nilai/hasil akhir "4.5 (empat koma lima)" dari skala "7 (tujuh)" yang berarti *'Documents Available and Evidence That They Are Used'* pada asesmen tingkat prodi AUN-QA *(ASEAN University Network Quality Assurance);*
- Program Studi S1 Kimia FMIPA-UI juga memperoleh asesmen level internasional melalui *Royal Society of Chemistry* (RSC) dengan predikat *'partially accredited'* – artinya dari butir-butir yang dinilai oleh tim RSC, sebagian sudah memenuhi standar RSC, sedangkan sebagian lainnya perlu ditingkatkan;
- Program Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia mendapat akreditasi internasional oleh Association of MBA's Accredited (AMBA), pada bulan Februari 2019.
- Proses untuk mendapatkan akreditasi internasional oleh AMBA berlangsung sekitar 3 tahun. Beberapa poin penting yang dinilai yaitu kontribusi MM FEB UI secara global, banyaknya alumni menempati posisi penting di masyarakat, jaringan alumni cukup baik, keaktifan fakultas dalam beberapa jaringan internasional, serta proses seleksi yang terselenggara secara ketat untuk mendapatkan mahasiswa dengan kualitas baik.

Program Studi Hubungan Internasional UKI Menuju Akreditasi Internasional

Harapan untuk mencapai PT atau PS unggulan secara eksplisit mulai digaungkan dalam kepemimpinan Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H., MBA masa bakti 2018-2022. Pada tahun pertama diagendakan fase konsolidasi seluruh elemen UKI dan pada tahun kedua mulai fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Dua prodi (Hukum dan Hubungan Internasional) telah diagendakan untuk mempersiapkan diri menuju akreditasi internasional, mengingat 2 prodi tersebut bersama prodi Arsitektur telah mencapai akreditasi A oleh BAN-PT.

Dalam merespons rencana tersebut tentu "kesiapan" program studi menjadi hal yang mendesak untuk diidentifikasi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melihat "kesiapan" program studi antara lain posisi perguruan tinggi dalam kerangka "klusterisasi"yang diumumkan oleh pemerintah, perubahan instrumen akreditasi BAN-PT (IAPT dan IAPS 4.0), sistem penjaminan mutu internal dengan komitmen dan pengadaan segala kelengkapan oleh PT dan Yayasan untuk mendukung program akreditasi internasional.

Dalam rangka mengejawantahkan pengembangan kualitas SDM seperti yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam lima tahun pemerintah keduanya (2019-2024), mau tidak mau 4680 lembaga pendidikan tinggi di Indonesia harus berbenah menjadi organisasi yang sehat karena menjadi tumpuan utama pengembangan sumber daya manusia Indonesia (Indonesia.go.id 2019). Di tengah keberagaman kualitas PT menjadi sangat mendesak bagi pemerintah untuk menemukan kerangka pengembangan yang sesuai dan mampu meningkatkan mutu secara keseluruhan mengingat situasi PT yang sangat variatif dengan segala perbedaan kualitas, jenis dan ukuran (Priyatma 2019). Pemerintah sudah memulai dengan melakukan klusterisasi dimana PT dalam satu kluster mempunyai kualitas yang mirip yang kemudian seharusnya ditindaklanjuti dengan program pengembangan yang sesuai untuk setiap kluster. Hasil klusterisasi pemerintah memuat lima kluster untuk tahun 2010 PT non-vokasi: 14 PTN di kluster I, 72 PTN dan PTS di kluster II, 299 PT di kluster III dan 1725 PT di kluster IV dan V dengan menggunakan 6 aspek penilaian, indikator setiap aspek dan bobot yang telah ditetapkan (Kemristekdikti, Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019). Hasil klusterisasi menunjukkan bahwa UKI berada pada peringkat 86 atau masuk dalam kluster 3 (Wartakota 2019).

Meski kondisi PT Indonesia sangat beragam, secara umum menurut Johanes Eka Priyatma, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, PT dapat dikelompokkan menjadi tiga (Arifin 2019), yaitu pertama, PT yang

mampu berkontribusi mengatasi persoalan pembangunan bangsa. Kedua, PT yang masih berjuang mengatasi persoalan manajemen organisasi dan ketiga PT yang masih berkutat mencukupi kebutuhan dasarnya. Kluster I dapat disejajarkan dengan kelompok pertama, kluster II dan III sejajar dengan kelompok kedua dan kluster IV dan V menjadi kelompok ketiga. Lebih jauh diuraikan oleh Priyatma bahwa PT dalam kelompok pertama paling sesuai dikembangkan menjadi universitas riset (research university), khususnya untuk membantu mengatasi persoalan pembangunan yang kian kompleks. PT kelompok ini sebaiknya fokus pada pengembangan program S2 dan S3 dan tidak perlu menyibukkan diri dengan program diploma. PT di kluster ini lebih baik didorong menjalin kerja sama dengan luar negeri dan diharapkan bisa mempunyai kualitas global sehingga mampu meraih status universitas berkelas dunia. Dukungan pemerintah bisa dalam bentuk kerja sama menyelesaikan masalah pembangunan yang bersifat strategis yaitu pangan, kesehatan, energi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu PT di kelompok kedua masih perlu meningkatkan produktivitas dan kualitas kegiatan Tridharma agar menjadi PT kluster I dengan kerangka pengembangan yang cocok berupa penerapan manajemen strategis – melalui berbagai hibah kompetitif. Sementara itu akreditasi BAN dapat menjadi sarana efektif meningkatkan kualitas Tridharmanya. Ketiga, PT yang masih harus berjuang mencukupi pendanaan operasionalnya. Jumlah PT ini sangat banyak namun jumlah mahasiswa sangat sedikit. Kerangka pengembangan yang ditawarkan menuntut pendekatan tidak biasa misalnya dengan penggabungan PT dengan insentif merger yang sangat menarik.

Potret Prodi HI UKI sedikit banyak tercermin dalam klusterisasi PT 2019 tersebut di atas. Meskipun melalui akreditasi BAN-PT 2015 telah mendapatkan akreditasi A (skor batas 361) setelah mendapatkan akreditasi B sebanyak dua kali namun akreditasi BAN-PT 2019 telah mengalami perubahan paradigma dengan basis penilaian outcome (luaran) melalui 9 instrumen yang berbeda dari sebelumnya melalui 7 instrumen berbasis input. Dari segi timing akreditasi BAN-PT 2019 kurang berpihak kepada Prodi HI karena merupakan prodi yang harus menempuh instrumen IAPS 4.0 dengan jangka waktu persiapan yang sangat pendek (enam bulan sebelum 6 April 2020 sementara instrument IAPS resmi baru terbit bulan Juli 2019). Hasil dari akreditasi dengan persiapan minimal dimana universitas/fakultas/program studi boleh dikata belum selesai membangun tata kelola dan sistem yang mantap untuk meningkatkan kualitas Tridharma – akan menjadi bagian dari titik tolak persiapan seperti apa yang harus dilakukan dalam menuju akreditasi internasional. Dengan kata lain, Prodi HI masih harus membenahi manajemen strategis secara sistematis dan terukur sesuai dengan pertama-tama akreditasi instrumen BAN-PT (nasional) dan baru kemudian instrumen badan akreditasi internasional yang dipilih.

Pada tingkat manajemen praktis, Prodi HI belum merasakan layanan dan fasilitasi akreditasi dalam bentuk bimbingan teknis dari lembaga penjaminan mutu tingkat universitas setidaknya dalam 3 hal dengan termin yang jelas yaitu bimbingan teknis, (i) asesmen luaran, (ii) dokumen rekognisi dan (iii) persiapan visitasi. Model bimbingan teknis LAM-PTKes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) dapat menjadi rujukan model kerja bimbingan teknis internal yang sifatnya suportif, berdasarkan kondisi spesifik prodi versus standar luaran yang ditetapkan BAN-PT dan dengan dukungan sistem manajemen universitas yang responsif baik dari segi keuangan maupun kebijakan dan SOP kebutuhan SDM/layanan lain misalnya rekruitmen dosen yang dibutuhkan tepat waktu, tersedianya staf khusus sebagai bagian dari program persiapan sejak tahun pertama sertifikat akreditasi keluar, tersedianya ruang khusus dengan layout dan sarana memadai, penajaman strategi melalui focus group discussion seluruh elemen Prodi dan sebagainya.

Keseluruhan sistem yang belum andal serta manajemen SDM tingkat prodi yang tidak selalu mulus menuju realisasi visi yang padu menjadi bagian dari tantangan internal Prodi HI untuk mempertahankan akreditasi unggulannya. Sementara tantangan eksternal adalah perubahan/peningkatan instrumen akreditasi nasional yang seharusnya menjadi sesuatu yang selalu harus diantisipasi oleh pimpinan akademik pada tingkat universitas/fakultas dan prodi melalui suatu sistem yang baku dan tertata.

Penutup

Akreditasi bagi PT dan PS merupakan keniscayaan dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas harus ditempatkan pada posisi yang sangat "strategis" dan "prestisius" dengan kelengkapan sarana dan prasarana termasuk SDM yang memadai, website khusus dan tidak bisa hanya menjadi lembaga pelengkap yang dikerjakan secara parsial oleh tenaga paruh waktu (sambilan) yang bahkan terkadang tidak mendalami visi dan misinya dan bekerja secara ad hoc. Kondisi setiap prodi jika dilihat dalam kerangka klusterisasi PT menjadi refleksi dari kondisi PT itu sendiri karena prodi bekerja dalam kerangka PT dan tidak berdiri sendiri. Akreditasi nasional BAN-PT seharusnya tetap menjadi prioritas dan dikerjakan dengan sistem yang dibangun secara berkelanjutan dengan mengacu pada IAPS 4.0 secara maksimal. Apabila pekerjaan rumah tingkat pertama sudah dikerjakan dan mendapatkan hasil yang mantap, maka secara simultan akreditasi

AUN-QA ataupun akreditasi internasional lain dapat mulai dipersiapkan.

Sebagai catatan, banyaknya lembaga akreditasi internasional yang beroperasi saat ini juga perlu mendapatkan perhatian karena mempunyai model, sistem dan mekanisme akreditasi yang beragam. Sebagai gambaran, secara prinsip ada persamaan dan perbedaan antara akreditasi internasional dan penilaian AUN-QA. AUN-QA menggunakan outcomes sebagai rujukan evaluasi, tetapi standar rumusan outcomesnya ditentukan setiap prodi. AUN-QA hanya memberikan kriteria bagaimana seharusnya outcome dirumuskan sebaliknya pada akreditasi internasional rumusan outcomes ditentukan lembaga akreditasi yang umumnya didukung berbagai asosiasi profesi, asosiasi saintifik dan lainnya dimana kemampuan lulusannya dapat distandarkan secara internasional.

Sebelum memutuskan perlunya akreditasi internasional atau sertifikasi AUN-QA, beberapa refleksi Pepen Arifin menarik untuk dipertimbangkan. Apakah prodi memang membutuhkannya? Apakah akreditasi tersebut sejalan dengan visi-misi dan tujuan PT? Apakah prodi perlu pengakuan akan standar outcomenya? Apakah prodi membutuhkan branding untuk menarik minat calon mahasiswa baru? Atau prodi sebenarnya hanya perlu verifikasi bahwa penjaminan mutunya telah berjalan dengan baik. Pilihan-pilihan ini perlu dipertimbangkan dengan matang dan jawabannya terpulang kepada masing-masing PT. Namun satu prinsip dasar yang penting adalah bahwa outcome based education (OBE) adalah keniscayaan dan menjadi ration détre (reason for being) dari prodi – dimana lulusannya harus berguna bagi masyarakat dan untuk itu prodi harus dapat membangun sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan terukur. Dengan kata lain, akreditasi internasional bukan sekedar 'gagah-gagahan', namun harus dilandasi oleh pemahaman prinsip yang benar bahwa keberadaan prodi harus relevan dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dimana berada dan untuk itu diperlukan "cermin" untuk berkaca yaitu dalam bentuk berbagai instrumen akreditasi/sertifikasi baik nasional, regional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan

Kemristekdikti. Buku Pedoman Program Fasilitas Program Studi menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional. Report, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019.

Kemristekdikti. Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019. Report, Jakarta: Kemristekdikti, 2019.

—. PDDIKTI. 2019. https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt (accessed Agustus 25, 2019).

Website

Arifin, Pepen. Kompas.id. Agustus 22, 2019. https://kompas.id/baca/opini/2019/08/22/akreditasi-internasional-prodi-2 (accessed September 29, 2019).

AUN-QA. AUN-QA: A Teach of Quality. 2016. http://www.aun-qa.org/briefintroduction (accessed Agustus 27, 2019).

—. AUN-QA: A Teach of Quality. 2016. http://www.aun-qa.org/MessageChairperson (accessed Agustus 27, 2019).

Chula, OSM. OSM Chula. 2018. http://www.osm.chula.ac.th/index.php/m-qaulity/m-qa-learning/67-learning-qa/145-qa-aun-bangkok (accessed Agustus 27, 2019).

Indonesia.go.id. Indonesia.go.id. Juli 22, 2019. https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/fokus-utama-periode-kedua (accessed Agustus 27, 2019).

Initu.id. 2018. https://initu.id/amp/daftar-kampus-dengan-jurusan-hubungan-internasional-se-indonesia (accessed 2019).

Jayani, Dwi Hadya. databoks. April 29, 2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia (accessed Agustus 25, 2019).

Priyatma, Johanes Eka. Kompas.id. Agustus 26, 2019. https://kompas.id/baca/opini/2019/08/26/gagasan-pengembangan-perguruan-tinggi (accessed Agustus 28, 2019).

Putri, Teatrika Handiko. IDN Times. Mei 02, 2018. https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/menristekdikti-pendidikan-tinggi-harus-bisa-menjawab-persoalan-sosial-yang-makin-kompleks-1/full (accessed Agustus 25, 2019).

Wartakota. Wartakota Tribun News. Agustus 16, 2019. https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/16/daftar-lengkap-100-perguruan-tinggi-non-vokasi-terbaik-di-indonesia-tahun-2019-juara-itb?page=4 (accessed September 28, 2019).